



OPINI

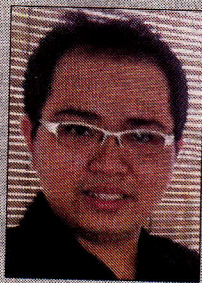
Sabdaraja dan Faktor GKR Mangkubumi

SETELAH 27 tahun bertahta, Raja Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam seminggu ini telah mentitahkan dua Sabdaraja. Keduanya menimbulkan pro-kontra dan berbagai pertanyaan dari masyarakat (kawula Mataram).

Sabdaraja pertama, yang disampaikan Kamis (30/4) pukul 10.00, terdiri dari lima poin. Pertama, penyebutan *buwono* diubah menjadi *bawono*. Kedua, tidak lagi menggunakan gelar *khali-fatullah*. Ketiga, penyebutan *kaping sedasa* diganti menjadi *kaping sepuluh*. Keempat, mengubah perjanjian antara Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. Kelima, menyempumakan keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek dengan keris Kanjeng Kiai Ageng Joko Piturun.

Dua poin pertama, diubahnya *buwono* menjadi *bawono* dan dihapusnya gelar *khali-fatullah*, dianggap banyak pihak sangat krusial. Dua hal ini telah mereduksi fungsi sekaligus identitas

■ Bersambung ke Hal 14



HENDRA KURNIAWAN MPD
Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Sabdaraja dan

Sambungan Hal. 13

spiritual Sultan dan keraton. Istilah *bawono* memiliki arti dunia dalam pengertian dunia batin, jiwa, atau rohani; sedangkan *buwono* adalah dunia dalam arti fisik atau ragawi.

Perubahan ini memberi penegasan bahwa Sultan bukanlah pemimpin politik yang memiliki kekuasaan absolut atas suatu wilayah dan rakyatnya. Sultan merupakan simbol keraton dan budaya, hanya kemudian, terkait UU Keistimewaan, Sultan juga menjabat sebagai gubernur DIY. Dalam konteks kekuasaan Jawa, raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Dihilangkannya gelar *khali-fatullah* menunjukkan bahwa Sultan tidak lagi sebagai pemimpin agama.

Selain dua poin besar itu, ketiga poin lainnya juga memiliki maksud tersendiri. Penyebutan *kaping sedasa* (*krama inggil*) menjadi *kaping sepuluh* (tingkatan bahasa di bawah *krama inggil*)

kiranya menunjukkan persamaan derajat. Kemudian, perjanjian antara Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan, kemungkinan terkait dengan soal pergantian *wangsa*. Konon, karena telah meminim air kelapa maka keturunan Ki Ageng Pemanahan bakal menjadi Raja Jawa, dan pada saatnya akan bergantian dengan keturunan Ki Ageng Giring.

Terakhir, keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek, yaitu simbol Sultan sebagai pemimpin pemerintahan dan agama, disempurnakan dengan Kanjeng Kiai Ageng Joko Piturun yang merupakan keris putra mahkota. Artinya, siapa yang disertai keris Kanjeng Kiai Ageng Joko Piturun, secara otomatis bakal memiliki hak menjadi Sultan lengkap dengan perannya.

Menilik isi Sabdaraja ini tampak bahwa Sultan sedang membangun tradisi baru dalam keraton guna mempersiapkan suksesi

tahta. Sultan sadar, calon penggantinya kelak seorang perempuan, yaitu anak pertamanya. Padahal, dalam adat keraton, hal ini belum pernah terjadi. Sementara itu juga, dalam tradisi Islam, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin agama. Lima poin Sabdaraja ini jelas bertendensi untuk memberi peluang munculnya raja perempuan (ratu) yang akan memimpin Keraton Yogyakarta.

GKR Mangkubumi

Dugaan itu segera terjawab. Menyusul yang pertama, Sabdaraja kedua dititahkan, Selasa (5/5) sekitar pukul 11.00. Prosesi berlangsung singkat dan tertutup. Isinya tunggal, yaitu pemberian nama baru bagi anak pertama Sri Sultan HB X, yaitu Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun, menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram. Hal ini, sekalipun belum final, menegaskan bahwa putri

sulang Sri Sultan HB X tengah dipersiapkan sebagai penerus tahta Keraton Yogyakarta.

Pemberian gelar Mangkubumi merupakan langkah pertama seseorang dicalonkan untuk menjadi putra (atau putri) mahkota. Akan tetapi tahapan ini masih akan bergantung pada penilaian selanjutnya. Periode menjadi Mangkubumi merupakan masa penja-jagan sampai seseorang benar-benar diterima dan layak menjadi pengganti raja.

Sri Sultan HB X boleh diakui sebagai raja yang berjiwa pembaharu dengan berani mengambil keputusan mengikuti perkembangan era demokrasi dewasa ini. Persoalannya, di sisi lain, adat belum sepenuhnya menerima. Di tengah kuatnya pro-kontra sekarang, waktu akan membuktikan apakah putri mahkota dapat "lulus ujian" dan duduk di singgasana kelak sebagai Ratu Yogyakarta. (*)